

**PERANAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR BALIHO
ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
SURABAYA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME
SKRIPSI**



OLEH :
MOCHAMAD WAHYU NOVIANTO
20300019

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**PERANAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR BALIHO
ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
SURABAYA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

MOCHAMAD WAHYU NOVIANTO

20300019

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**PERANAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR BALIHO
ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
SURABAYA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

MOCHAMAD WAHYU NOVIANTO

20300019

SURABAYA, 15 Januari 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSI, S.H., M.Hum

PEMBIMBING,

SHANTI WULANDARI, S.H., M.Kn.

**PERANAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR BALIHO
ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
SURABAYA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME**

SKRIPSI

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

MOCHAMAD WAHYU NOVIANTO

20300019

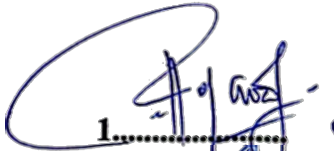
TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 31 JANUARI 2024


DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Desy Nurkristia Tejawati, SH., M.Kn. (KETUA)

1.....

2. Shanti Wulandari, S.H., M.Kn. (ANGGOTA)

2.....

3. Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H. (ANGGOTA)

3.....

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERANAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR BALIHO ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**” dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.

4. Shanti Wulandari, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.
5. Bapak Dan Ibu Dosen Serta staff Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Untuk kedua orang tua saya, ayah yang tercinta Sugeng Winarno, S.T. dan ibu saya yang tercinta Iswati yang mendidik saya dari kecil hingga saat ini, yang menjadi semangat saya hingga saat ini, dan mendampingi saya sampai hari tua beliau dan doa yang tiada henti yang mereka panjatkan kepada Allah SWT kepada saya sebagai penulis dan saya juga mengucapkan terimakasih kepada kakak saya Fitri dan adik saya Haafiz yang ikut serta dalam mendukung saya selama ini.
7. Untuk teman dekat yang menemani saya saat ini A'ishah Mutiara Ramadhan saya mengucapkan terimakasih karena telah menemani saya hingga selesai menyelesaikan penulisan.
8. Dan teruntuk kerabat, teman, sahabat saat dibangku kuliah saya sebagai penulis yaitu Reyhan, Christo, Rico, Abiyyu, Rizki, Ifan, terimakasih telah menemani, mendukung dari awal perkuliahan hingga saat ini.

Hormat Saya,

Mochamad Wahyu Novianto

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Wahyu Novianto
NPM : 20300019
Alamat : Putat Gede Timur IV No.37 Surabaya
No. Telp. (HP) : 089636761002

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“PERANAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR BALIHO ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO.5 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 15 Januari 2024

Yang Menyatakan,
Yang Menyatakan,

(Mochamad Wahyu Novianto)

NPM: 20300019

ABSTRAK

Penelitian Perkembangan industri periklanan yang pesat telah membawa dampak positif seiring dengan meningkatnya aktivitas pemasaran dan komunikasi di berbagai sektor. Namun, fenomena baliho ilegal menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatur baliho ilegal dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris, yang memfokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan baliho ilegal di Kota Surabaya. Data yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan, dokumen hukum, dan wawancara dengan pihak terkait di Pemerintah Kota Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan daerah tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasi permasalahan baliho ilegal. Penyelenggaraan reklame diatur dengan ketat melalui mekanisme izin dan perijinan, serta sanksi yang tegas bagi pelanggar. Pemerintah Kota Surabaya juga mengedepankan pendekatan persuasif dan preventif, seperti sosialisasi peraturan, untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya patuh terhadap peraturan tersebut. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatur baliho ilegal tidaklah ringan. Adanya faktor-faktor eksternal, seperti minimnya kesadaran masyarakat, kurangnya penegakan hukum yang konsisten, dan keberadaan praktik korupsi di sektor ini, menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pengaturan reklame yang efektif.

Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk lebih memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran reklame ilegal, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya patuh terhadap peraturan, dan memperkuat kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya, pihak swasta, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan publik yang bersih dan tertib. Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya pencegahan korupsi dalam pengawasan reklame di Kota Surabaya.

Kata Kunci : Baliho Ilegal, Peran Pemerintah, Perda

ABSTRACT

Research The rapid development of the advertising industry has brought positive impacts along with increased marketing and communication activities in various sectors. However, the phenomenon of illegal billboards is one of the main problems faced by the government in managing public space. This research aims to analyze the role of Surabaya City Government in regulating illegal billboards by referring to Surabaya City Regional Regulation No. 5 of 2019 concerning the Implementation of Billboards. The approach used in this research is an empirical legal approach, which focuses on analyzing the laws and regulations related to the regulation of illegal billboards in Surabaya City. The data used is sourced from literature studies, legal documents, and interviews with relevant parties in the Surabaya City Government.

The results show that the local regulation provides a strong legal basis for the Surabaya City Government to overcome the problem of illegal billboards. The implementation of billboards is strictly regulated through licensing and permit mechanisms, as well as strict sanctions for violators. The Surabaya City Government also prioritizes persuasive and preventive approaches, such as socialization of regulations, to encourage public awareness of the importance of complying with these regulations. Nonetheless, the challenges faced by Surabaya City Government in regulating illegal billboards are not light. The existence of external factors, such as the lack of public awareness, the lack of consistent law enforcement, and the existence of corrupt practices in this sector, are obstacles in achieving the goal of effective billboard regulation.

This study provides recommendations to further strengthen law enforcement against illegal billboard violations, increase socialization to the public regarding the importance of complying with regulations, and strengthen cooperation between the Surabaya City Government, the private sector, and the community in creating a clean and orderly public environment. In addition, it is also necessary to pay attention to corruption prevention efforts in billboard supervision in Surabaya City.

Keywords: Illegal Billboards, Government Role, Local Regulation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian	11
C. Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka Konseptual.....	12
1. Reklame Insidental Berupa Baliho	12
2. Peranan Pemerintah	13
3. Peraturan Daerah.....	15
4. Pengaturan Hukum.....	17
5. Kepastian Hukum.....	18
6. Pengawasan.....	21
7. Perizinan.....	22
E. Metode Penelitian	23
1. Tipologi Penelitian.....	23
2. Metode Pendekatan.....	23
3. Sumber Data.....	24

4. Metode Pengumpulan Data.....	24
5. Analisa Data.....	25
F. Pertanggung Jawaban Sitematika Penulisan	25

BAB II PROBLEMATIKA PENGATURAN PERIZINAN REKLAME INSIDENTIL BERUPA BALIHO DI SURABAYA BERDASARKAN KETENTUAN PERDA KOTA SURABAYA NO. 5 TAHUN 201926

A. Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2019 Sebagai Payung Hukum Dalam Pemasangan Reklame Insidentil Berupa Baliho Kota Surabaya	26
1. Mekanisme Pemasangan Reklame Insidentil Berupa Baliho Berdasarkan Ketentuan Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2019	26
2. Permasalahan Yang Timbul Dalam Hal Perizinan dan Pemasangan Reklame Insidentil Berupa Baliho	34
B. Bentuk Pengawasan Terhadap Pemasangan dan Perizinan Reklame Insidentil Berupa Baliho	35
1. Perspektif Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2019 Tentang Reklame Dalam Pengawasan Pemasangan dan Perizinan Reklame Insidentil Berupa Baliho	35
2. Penerapan Sanksi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2019 Tentang Reklame	38
3. Bagan Urutan Perizinan Reklame Insidentil Berupa Baliho Di Kota Surabaya.....	41

BAB III PERAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM MENANGANI REKLAME INSIDENTIL BERUPA BALIHO ILEGAL42

A. Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya Terkait Penangan Reklame Insidentil Berupa Baliho Ilegal	42
1. Hak dan Kewajiban Pemerintah Kota Surabaya.....	42
2. Tata Cara Penanganan Reklame Insidentil Berupa Baliho Ilegal	

.....	50
B. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Reklame Insidentil Berupa Baliho Ilegal Di Kota Surabaya	56
1. Minimnya Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Sebagai Penegak Hukum	56
2. Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Tidak Taat Aturan Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame Insidentil Berupa Baliho	60
BAB IV PENUTUP	65
A. KESIMPULAN	65
B. SARAN	66
DAFTAR BACAAN	69